HAKIKAT KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA

Oleh : Patawari

(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Kelas Makassar SMR. II)

Abstrak

Keterwakilan masyarakat dalam parlemen sekarang ini di dominasi oleh kelompok tertentu dan tidak mencerminkan kelompok-kelompok masyarakat lain. Parai politik sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan justru tidak memperhatikan kelompok masyarakat sehingga berakibat pada keterwakilan masyarakat yang dudu di dalam parlemen.

Ide kedaulatan rakyat harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. maka dalam pemilihan umum legislatif adalah adanya keterwakilan individu-individu, kelompok-kelompok masyarakat yang menjelma di dalam legislatif. Sehingga di dalam pengambilan kebijakan terjadi keseimbangan kepentingan rakyat. Tidak di dominasi oleh kelompok masyarakat tertentu.

Dalam legislatif perlu ditinjau ulang sistem pemilihan dengan meperhatikan keterwakilan kelompok masyarakat yang diatur dalam peraturan pemilihan umum .

Kata Kunci : Hakikat Kedaulatan rakyat, Pemilu legislatif

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, mengisyaratkan akan adanya pelaksanaan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan adanya sistem perwakilan untuk mewakili kehendak dan keinginan masyarakat secara umum.

1

¹ Pengambilan keputusan yang bijaksana adalah sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan (Preamble) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sila ke-IV yaitu "kerakyatan

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan.²

Pada hakikatnya dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 292

sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dan tentunya UUD NRI Tahun 1945 dengan segala ketentuannya merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, baik yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan (*representative democracy*) melalui lembaga perwakilan rakyat.

Oleh sebab itu pula, organ atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara dianggap melaksanakan amanat kedaulatan rakyat dan tunduk pada kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan undang-undang dasar.³

Pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan Sebagaimanan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat

(2) bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Partai Politik merupakan wadah di dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan melaksanakan fungsi rekrutmen politik, sosialisasi politik, sarana pencerdasan dan atau pembentukan karakter dan perilaku pemilih. Sehingga partai politik sangat berperan penting di dalam melaksanakan kedaulatan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat secara umum.

Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila

³ Agmanul Hasugian hak recall partai politik terhadap anggota dewan perwakilan Rakyat indonesia dalam korelasinya dengan pelaksanaan teori Kedaulatan rakyat, 2011 hlm 20

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Selain dari pada asas pelaksanaan pemilihan umum, juga diperlukan sistem pemilihan umum yang dapat menjawab kehendak akan keinginan rakyat di dalam mewujudkan kedaulatannya. Sistem pemilihan umum paling tidak dapat mewakili kelompok-kelompok yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Selain dari pada keterwakilan kelompok di dalam masyarakat, soyogyanya masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu adalah dapat mengatur dan mengendalikan diri dan lingkungannya kepentingan masing-masing. Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat adalah menjadi katalisator dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seui “selesa” masing-masing.

Sehingga dalam momen pemilihan umum tidak ada masyarakat yang merasa tidak

terwakili kepentingan dari pada kelompoknya, minimal di dalam setiap pemilihan umum. Seperti halnya dalam undang – undang pemilihan umum dengan adanya keterwakilan 20% perempuan, sebagai perwujudan dari pada kelompok masyarakat.

Pada Pasal 6 Ayat (1) undang undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

“Sistem proporsional daftar calon terbuka”, tidak mewakili keterwakilan dan kepentingan kelompok masyarakat. Semua masyarakat disamakan secara individu, dalam arti tidak ada klasifikasi oleh karena sistem proporsional daftar calon terbuka tidak memberikan isyarat adanya pengelompokan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Marzuki⁵ bahwa dengan sistem

⁴ *Sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan undang undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum*

⁵ *Marzuki “pengaruh sistem pemilihan umum terhadap keterwakilan politik masyarakat*

proporsional daftar calon tertutup dan sistem proporsional daftar calon terbuka yang disertai dengan penetapan BPP (bilangan Pembagi Pemilih) belum mencerminkan keterwakilan politik masyarakat dalam arti formil.

Dengan sistem proporsional daftar calon terbuka keterwakilan kelompok masyarakat tidak terakomodir baik dari segi jumlah penduduk, etnis, agama, jender, kelompok akademis (dosen, guru), petani dan nelayan, buruh, pengusaha. Oleh karena, penentuan calon anggota DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di dominasi oleh kekuatan partai Politik.

Dengan sistem Proporsional calon terbuka, tidak ada jaminan standar kualifikasi calon legislatif, para calon semua sama sebagai wakil rakyat sekalipun tidak tahu menahu kelompok rakyat mana yang harus di perjuangkan.

Oleh karena sistem proporsional daftar calon terbuka

dimana kedaulatan rakyat dikuasai oleh parlemen yang dipilih melalui jalur partai politik. Partai politik yang memiliki kedaulatan tertinggi di dalam penentuan calon tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat.

Sekalipun suara rakyat mendominasi calon sehingga ia terpilih dalam parlemen, akan tetapi oleh karena keinginan partai politik untuk menggantikan (penggantian antar waktu) maka yang berdaulat adalah partai politik. sehingga pengganti dari pada anggota parlemen yang terpilih tersebut adalah di tentukan oleh partai politik tanpa adanya pertimbangan oleh masyarakat yang telah memilihnya.

Disetiap momen pemilihan umum yang terjadi adalah adanya Konflik ketegangan antar calon sangat tinggi, oleh karena wilayah sosialisasi politik dan konstituen yang sama sehingga terjadi adalah konflik yang bermuara para terjadinya benturan hingga ditingkatan konstituen .

Pelaksanaan sistem pemilihan umum pada anggota DPR

*pada DPR-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara,
Disertasi Medan 2007*

masyarakat dilihat sebagai pemilik kedaulatan dengan berdasarkan individu, bukan sebagai kelompok atau golongan. Sehingga masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tidak ada keterwakilan kelompok di dalam parlemen, segala kebijakan di tentukan oleh Partai Politik tanpa adanya legitimasi dari masyarakat yang mempunyai kepentingan.

Dari latar belakang tersebut di sebagai batasan masalah padapada jurnal ini adalah Bagaimanakah hakikat kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif? Dan Sejauhmanakah system pemilihan organis dan distrik dalam mewujudkan berkedaulatan rakyat dalam pemilu legislatif ?

PEMBAHASAN

A. Hakikat Negara demokrasi

Lyman Tower Sargent,
menyatakan bahwa negara

dalam pengambilan keputusan politik)

2. *Some degree of equality among citizens* (adanya persamaan derajat diantara warganegara)
3. *Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizes* (adanya jaminan persamaan kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negara)
4. *A system of representation* (adanya sistem perwakilan)
5. *An electoral system-majority tule* (adanya aturan sistem pemilihan umum).

Dari pandangan Sarent tersebut di atas pada point 2, yaitu “adany persamaan kedaulatan sesama warganegara” dalam kontek keindonesiaan sangat jauh dari kenyataan dalilnya bahwa di dalam parlemen anggota legislatif baik ditingkat pusat,

⁶ Lyman Tower Sargent, *contemporary political ideologies*, (chicago; the dorsey press, 1984, hlm 32-33

Provinsi dan Kapbuapten/Kota di dominasi oleh wakil masyarakat yang nota bene dari kelompok/profesi pengusaha, sedangkan idealnya kursi legislatif itu diisi oleh seluruh kelompok masyarakat.

Dominasi kelompok masyarakat dari kelompok masyarakat tersebut adalah jika tidak lepas dari sistem pemilihan umum yang diatur dalam peraturan, yakni sistem pemilihan proporsional. Yang mana sistem proporsional sangat keterwakilan rakyat dalam legislatif sangat ditentukan oleh partai politik.

Sehingga sistem pemilihan umum perlu diatur dalam peraturan pemilihan umum, sekalipun harus melalui partai politik namun ditentukan akan keterwakilan kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, cendikia (akademisi), praktisi, agamawan, perempuan adat, dan kelompok profesi lainnya, bahkan hingga pada keterwakilan kelompok TNI dan

atau kepolisian. sehingga di dalam kebijakan pemerintah yang harus melalui legislatif dapat terjadi keseimbangan.

Sedangkan menurut Hans Kelsen bahwa demokrasi adalah *democracy means that the will which is represented in the legal order of the state is identical with the wills of subjects* (demokrasi berarti bahwa kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan kehendak dari pada subyek atau warganegara)⁷

Beberapa unsur tersebut terkait dengan ungkapan Miriam, Budiardjo⁸ bahwa sistem pemilihan umum dan sistem perwakilan adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warganegara, maka pemilihan umum berarti proses

⁷ Hans Kelsen, *General Theory*, hlm. 284

⁸ Miriam, Budiardjo "Hak Asasi Manusia dalam dimensi Global" (Jakarta: jurnal Ilmu Politik, No. 10,1990), hlm 37

penyerahan sementara hak politiknya kepada wakil rakyat. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Sedangkan menurut Brian Z. Tamanah⁹: democracy is a blunt and unwieldy mechanism that offers no assurance of producing morally good laws. Aside from vindicating the political liberty of individual citizens (at leasting in theory), perhaps its strongest justification, not an inconsiderable one, is that it is less fraught with risk than any other system that can be presently imagined. certainly it is the best way yet devised to change political leaders, but that is an entirely separate issue from how best to make law. this is hardly a reassuring endorsement. when democracy is cited as grounds for the legitimacy of law, and the values of formal legality are offered as additional reasons for legitimacy, the moral claim of law to ebedience might seem weighty. is should no t be forgotten, however, that neither of these formal mechanisms ensure that the laws enacted an carried out will be moral in content of effect. Bahawa (demokrasi adalah mekanisme berat dan tidak begitu baik sebab tidak menawarkan jaminan prodak moral hukum yang baik. Selain membenarkan kebebasan

politik warga negara individu (di dalam teori), namun demikian pembenaran kekuasaan lebih baik, karena kurang penuh dengan risiko dari pada sistem lain yang dapat ada saat ini. pasti ini adalah cara terbaik belum dibuat untuk mengubah pemimpin politik, tetapi itu adalah masalah yang sama sekali terpisah dari bagaimana cara terbaik untuk membuat hukum. ini bukan merupakan dukungan meyakinkan. ketika demokrasi dikutip sebagai alasan untuk legitimasi hukum, dan nilai-nilai legalitas formal yang ditawarkan sebagai alasan tambahan untuk legitimasi, klaim moral hukum untuk ebedience mungkin tampak berat. ini harus t tidak dilupakan, bagaimanapun, bahwa tidak satu pun dari mekanisme formal memastikan bahwa hukum berlaku yang telah dilakukan akan moral dalam konten efek.)

B. Hakikat kedaulatan

Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi) . hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan

⁹ Brian Z. Tamanaha; On the rule Of Law, Cambridge University Press, 2004 Hal 101

ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan.

Menurut Jean Jacques Rousseau¹⁰ kekuasaan berdaulat itu, yang tak lain dari pengejawentahan kehendak umum. Bahwa ketika sistem pemilihan umum diatur dengan memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat maka wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif mencerminkan masyarakat secara umum yang diwakilinya.

*Jimly Assidiqi*¹¹ kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

dalam hal siapa yang berdaulat maka dikenal lima teori atau ajaran yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu : teori keedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Raja, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan rakyat.

pada konteks Indonesia sebagai penjelmaan dari pada republik, maka kedaulatan

tertinggi adalah ada di tangan rakyat. sehingga rakyatlah sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dan kedaulatan tersebut di wakili oleh legislatif. Maka pada kesimpulannya bahwa “kedaulatan tertinggi adalah ada di tangan legislatif, sebagai penjelmaan dari rakyat secara umum”

Dalam encyclopedia of sciences, hlm 267 dan dalam encyclopedia internasional hal 242, disebutkan bahwa kedaulatan itu adalah seseorang atau sekelompok orang, suatu badan atau sekelompok badan yang melegislasikan dan mengadministrasikan fungsi pemerintahan (an individual or group of people, an organ or a group of organs legislates and administers the function of government)¹²

Kedaulatan sesungguhnya berdasarkan definisi ensiklopedia tersebut bahwa; kedaulatan ada pada individu-individu yang menjelma dalam suatu

¹⁰ Jean Jacques Rousseau berdaulat adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang mengungkapkan kehendak umum, dimuat pada buku yang berjudul *Kontrak Sosial* atau *Prinsip-prinsip Hukum Politik*, 2010. Hlm.31

¹¹ Jimly Ashiddiqy Op.cit 11

¹² Jimly Ashiddiqy op.cit. 10

kelompok-kelompok yang terbentuk dan selanjutnya kelompok tersebut emmpercayakan kepada seseorang atau beberapa orang untuk mewakili kepentingan masing-masing di dalam pengambilan kebijakan dalam tingkat pemerintahan (legislatif).

Sedangkan Hamid S. Attamimi menyebutkan lima ajaran yaitu kedaulatan dalam lingkungan sendiri, kedaulatan raja, ajaran kedaulatan negara, dan ajaran kedaulatan rakyat.¹³

Pandangan Hamid Attamimi memeberikan gambaran dinamika kedaulatan yang terjadi di beberapa negara. Secara umum dalam perkembangan kedaulatan pada dasarnya berawal dari kedaulatan tertinggi ada di tangan Nabi-nabi, sebagai penjelmaan dari kedaulatan Tuhan, selanjutnya kedaulatan di ada di tangan rakyat (suara rakyat suara Tuhan). Dalam

fenomena ketata negaraan Indonesia justru bukan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, namun kedaulatan tertinggi ada di tangan Partai Politik.

Sedangkan pandangan Niklas Luhmann¹⁴ Politics is not the ongoing interpretation of legally fixed constitution. and no adequate theory of the legal system can be constructed if its factual operation are defined as the implementation of political programmes. all attempts to steer the courts politically. (Politik bukanlah penafsiran yang sedang berlangsung dalam konstitusi (hukum tetap). dan tidak ada teori yang memadai dari sistem hukum dapat dibangun jika operasi faktual yang didefinisikan sebagai pelaksanaan program-program politik. semua upaya untuk mengarahkan pengadilan politik.)

Dalilnya bahwa, hampir semua kebijakan pemerintahan di tentukan oleh kekuatan partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan. Dan nyaris kepentingan tersebut tidak bermuara untuk kepentingan rakyat secara umum.

¹³ Hamid S. Attamimi dalam disertasinya yang tidak menyebutkan tentang ajaran kedaulatan tuhan akan menggantikannya dengan ajaran kedaulatan dilingkungan sendiri.

¹⁴ Luhmann law as a social system, oxford socio –legal studies, 1993 hal. 39

Kepentingan semata di dominasi oleh kehendak dan keinginan partai politik. sebagai contoh, sekalipun rakyat (konstituen) memilih, dan akhirnya terpilih anggota DPR "A", maka dengan alasan Anggota DPRD A tersebut partai politik menginginkan untuk di anulir atau dilakukan pergantian antar waktu (PAW) maka yang sah adalah keputusan partai politik, dan mengabaikan kepentingan rakyat (konstituen) yang masih menginginkan tersebut.

C. System pemilihan umum

Berkenaan dengan esensi keterwakilan rakyat jimly Asshiddiqie¹⁵ bahwa :

Jika sistem pemilihan umum yang dipakai adalah sistem suara berimbang (proporsional), maka derajat hubungan keterwakilan antara rakyat dan para wakilnya cenderung berjarak, tidak sedekat atau seakrab seperti dalam sistem distrik.

Dalam pembahasan sistem pemilihan umum, menurut Bintang R. Saragih¹⁶, meliputi dua hal pokok, yaitu :

Pertama, bagaimana melaksanakansistem yang sudah ada aturan-aturannya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara demokrasi konstitusional). Ini sering disebut dengan sebagai *electoral laws* yang mengatur sistem pemilu dan aturan-aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu di tetapkan dan sebagainya.

Kedua, bagaimana mekanisme melaksanakan suatu pemilu yang bisa disebut sebagai *electoral process*. Dalam *electoral process* ini ditentukan misalnya: siapa panitia penyelenggara pemilu, partai atau organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat berkampanye, kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi pemindahan pemilih dan sebagainya

Secara garis besar pemilihan umum terdapat dua model berkaitan dengan sistem pengisian keanggotaan lembaga perwakilan rakyat yang cukup banyak

¹⁵ jimly Asshiddiqie *Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004) Hlm 44

¹⁶ Bintang R. Saragih "Masyarakat Indonesia dan sistem pemilu", hlm 307.

penganutnya, yaitu sistem oraganis dan sistem mekanis¹⁷

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan, yaitu:

Pertama hakikat kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum legislatif adalah adanya keterwakilan individu- individu, kelompok-kelompok masyarakat yang menjelma di dalam legislatif. Sehingga di dalam pengambilan kebijakan terjadi keseimbangan kepentingan rakyat, tidak di dominasi ole kelompok masyarakat tertentu.

Kedua, sistem pemilihan umum yang sekarang ini sangat di dominasi oleh kepentingan partai politik di dalam penentuan wakil rakyat sehingga tidak mengakomodir beberapa kepentingan kelompok-kelompok masayarakat .

S a r a n

Pertama, dalam legislatif perlu adanya keterwakilan

kelompok-kelompok masyarakat. Adalah tidak di dominasi oleh kelompok tertentu seperti sekrang ini.

Kedua, Perlu ditinjau ulang sistem pemilihan dengan meperhatikan keterwakilan kelompok masyarakat yang diatur dalam peraturan pemilihan umum

DAFTAR PUSTAKA

- Agmanul Hasugian. 2011. *hak recall partai politik terhadap anggota dewan perwakilan Rakyat indonesia dalam korelasinya dengan pelaksanaan teori Kedaulatan rakyat*,
- Bintang R. Saragih "*Masyarakat indonesia dan sistem pemilu*",
- Brian Z. Tamanaha; *On the rule Of Law*, Cambridge University Press, 2004
- Hamid S. Attamimi dalam disertasinya yang tidak menyebutkan tentang ajaran kedaulatan tuhan akan menggantikannya dengan ajaran kedaulatan dilingkungan sendiri.
- Hans Kalsen, *General Theory*,
- Jimly Asshiddiqie. 1993. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia:Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam*

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim"pengantar hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1983) hlm 333

*Kebijakan Demokrasi Politik
Dan Demokrasi Ekonomi
Selama Tiga Masa
Demokrasi. 1945-1980-an.*
Disertasi Pada Fakultas
Pasca Sarjana Universitas
Indonesia. Jakarta.

jimly Asshiddiqie 2004 *Format
kelembagaan Negara dan
Pergeseran Kekuasaan dalam
UUD 1945*, (Yogyakarta: FH
UII Press,)

Luhmann *law as a social system*,
oxford socio –legal studies,
1993

Lyman Tower Sargent. 1984.
*contemporary political
ideologies*, (chicago; the
dorsey press.

Marzuki. 2007 *“pengaruh sistem
pemilihan umum terhadap
keterwakilan politik
masyarakat pada DPR-DPRD
Di Provinsi Sumatera Utara*,
Disertasi Medan

Miriam , Budiardjo *“Hak Asasi
Manusia dalam dimensi
Global “* (jakarta: jurnal Ilmu
Politik, No. 10,1990) ,

Miriam Budiardjo, dasar-dasar ilmu
Politik (jakarta: Gramedia
Pustaka utama, 2003, hlm
160

Moh. Kusnardi dan Harmaily
Ibrahim. 1983.”pengantar
hukum Tata Negara
Indonesia Jakarta: CV. Sinar
Bakti.